KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR jamin anggaran Pemilu 2024
Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

DPR Jamin Anggaran Pemilu 2024

Tiga bulan menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024, anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu belum juga ditetapkan. KPU mengusulkan anggaran Rp 76 triliun, turun dari usulan semula Rp 86 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024 sudah menjadi kebijakan negara yang disepakati bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk mengawal pemilu berjalan sesuai jadwal sekaligus menjamin terpenuhinya anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Jaminan pemenuhan anggaran itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam sambutan pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Ruang Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3/2022). "Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara, yang telah ditetapkan bersama DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," kata Puan.

Pemungutan suara Pemilu 2024 sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Penetapan itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah berkonsultasi dalam jangka waktu yang cukup lama dengan pemerintah dan DPR. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada bulan Juni nanti.

Mengingat kian dekatnya tahapan pemilu, Puan meminta seluruh alat kelengkapan DPR untuk mengawal persiapan penyelenggaraan pemilu. Tak hanya regulasi dan persiapan teknis, komisi atau badan terkait di DPR juga diminta mempersiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan di setiap tahapan pemilu.

"Kami sebagai pimpinan DPR berkomitmen untuk bisa memberikan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapannya," ujar Puan.

Dengan adanya jaminan anggaran, diharapkan seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memastikan, anggaran pemilu sudah ditetapkan sebelum tahapan dimulai, tiga bulan mendatang.

Sampai saat ini, anggaran Pemilu 2024 belum juga ditetapkan. Padahal, KPU sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Tahun 2022 ini, KPU membutuhkan anggaran Rp 8,06 triliun, tetapi pemerintah memberikan pagu anggaran sebesar Rp 2,45 triliun. Ini berarti, anggaran KPU, termasuk untuk membiayai tahapan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2022, masih kurang sekitar Rp 5,6 triliun.

Puan menegaskan, DPR akan membahas anggaran setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai disusun dan ditetapkan. DPR juga memandang, akan lebih baik jika tahapan, program, dan jadwal pemilu sekaligus anggaran dibahas oleh KPU dan Bawaslu baru periode 2022-2027.

"Jadi, kita tunggu saja, kan ini anggota Bawaslu dan KPU yang akan datang ini belum dilantik. Tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapannya itu, serta pengelolaan keuangannya itu, secara akuntabilitas, nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," tutur Puan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang menambahkan, rapat pembahasan rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu diagendakan digelar pada 11 April 2022, tepat saat masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 berakhir. Komisi II meminta pelantikan calon anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 dipercepat karena harapannya pembahasan rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal dilakukan bersama penyelenggara pemilu baru.

"Kami harapkan lima hari sebelum KPU-Bawaslu berakhir pada 11 April 2022, mereka sudah dilantik," ujar Junimart.

Secara terpisah, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, draf PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal sudah selesai disusun. KPU berharap rancangan PKPU itu bisa secepatnya dibahas bersama DPR dan pemerintah. Sebab, penetapan PKPU itu menjadi prasyarat pembahasan anggaran pemilu.

"Kami akan mengirim surat ke Komisi II DPR agar segera dilakukan pembahasan tentang rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal," ucapnya.

Kawal DPR

Sementara mantan anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, publik mesti ikut mengawal komitmen DPR akan memenuhi anggaran Pemilu 2024. Anggaran yang memadai diperlukan untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas. Terlebih, tantangan pada Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding pemilu sebelumnya.

Namun, di sisi lain, KPU harus bisa menjelaskan kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 76 triliun itu kepada DPR dan pemerintah.

Menurut Hadar, peningkatan anggaran dari Rp 25 triliun pada Pemilu 2019 menjadi Rp 76 triliun dinilai wajar mengingat kebutuhan untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu mendatang cukup besar.

"Jangan kemudian anggarannya ditekan-tekan lagi karena kebutuhan anggaran Pemilu 2024 jauh lebih besar dibanding pemilu sebelumnya. Penggunaannya pun pasti akan dipertanggungjawabkan dan diaudit," ujar Hadar.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity itu menjabarkan, jumlah petugas *ad hoc* lebih dari 50 persen dari semua penyelenggara pemilu. Honorarium penyelenggara pemilu *ad hoc* juga mesti ditingkatkan karena beban kerja mereka sangat berat. Kenaikan honorarium penyelenggara pemilu *ad hoc* dari pemilu sebelumnya yang sebesar Rp 500.000 menjadi Rp 1,5 juta dinilai wajar. Peningkatan itu, bahkan, bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi petugas *ad hoc* di tengah beban berat dan tingginya risiko kesehatan.

Selain itu, pengembangan teknologi informasi untuk memudahkan penyelenggaraan pemilu juga membutuhkan biaya yang tidak murah. Anggaran pun pasti akan meningkat jika peserta pemilu lebih banyak dibanding Pemilu 2019. Apalagi, ada kebutuhan untuk pemenuhan alat pelindung diri karena penyelenggaraannya dilakukan masih dalam masa pandemi Covid-19.

Efisiensi bisa dilakukan dengan mengurungkan usulan anggaran yang menyangkut fisik, seperti pembangunan gudang, kantor, dan pengadaan kendaraan operasional. "Tapi, pemerintah harus mencari jalan keluar jika anggaran untuk sektor ini tidak bisa dimasukkan dalam anggaran pemilu," ucap Hadar.

Namun, sebelum itu, PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 mesti segera ditetapkan. Komisi II DPR tidak perlu menunggu KPU baru untuk membahas regulasi dan anggaran pemilu. Sebab, ada anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022 yang kembali lolos menjadi penyelenggara pemilu baru. Selain itu, pembahasan anggaran lebih banyak melibatkan Sekretariat Jenderal KPU.

(SYA/BOW/PDS)